

**PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
BIDANG KESEHATAN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diteruskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tentang Penerapan SPM, bahwa daerah wajib merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan pencapaian SPM pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang mencakup Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Sosial dan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

**Urusan Kesehatan**

Penerapan dan pencapaian standar minimal urusan kesehatan memuat :

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah **pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.**

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

3. Realisasi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%

Berdasarkan tabel pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Capaian layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

Capaian layanan dasar pada indikator tersebut pada tahun 2021 sebesar 100 % dari target 100%,. Dengan jumlah penduduk Kalimantan Barat yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun sebanyak 5.134.760 orang dan terlayani semuanya sehingga realisasi mencapai 100%.

Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama}} \times 100\% \\ &= \frac{2.116.190 \text{ orang}}{2.116.190 \text{ orang}} \times 100\% \\ &= \mathbf{100 \%} \end{aligned}$$

- b. Capaian layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi.

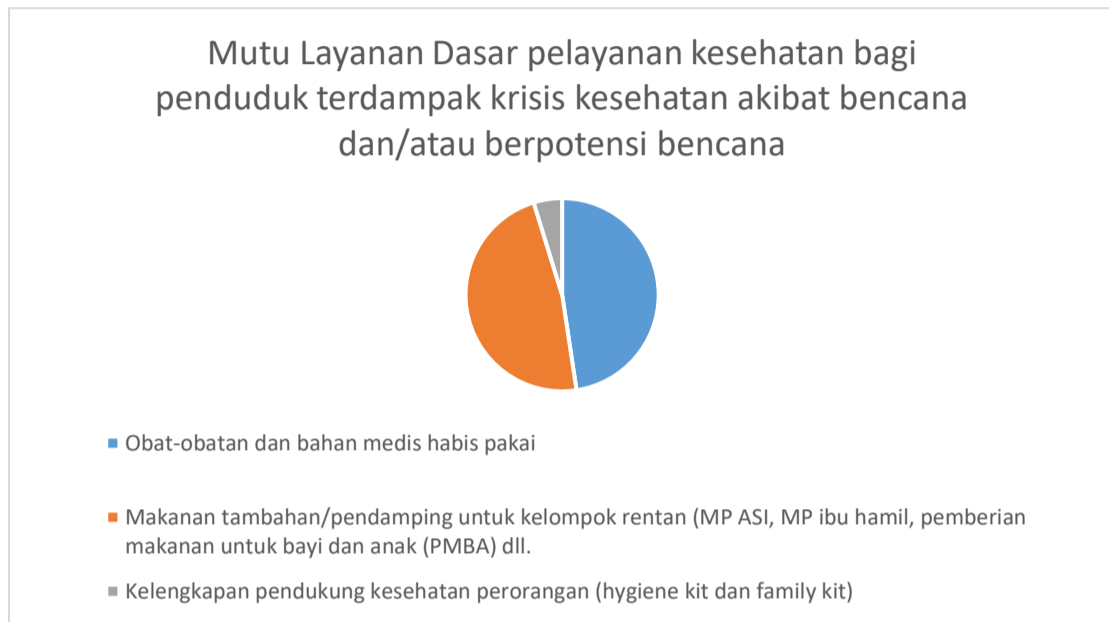
Capaian layanan dasar pada indikator ini mencapai 100% dari target 100%, pemerintah provinsi Kalimantan Barat bekerja maksimal dalam menangani kejadian luar biasa pandemi covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak bulan maret tahun 2020.

Mengukur persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB}} \times 100\% \\ &= \frac{3.347.147 \text{ orang}}{5.162.937 \text{ orang}} \times 100\% = 64,83 \% \end{aligned}$$

- c. Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana.

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	1135104	1135104	0	100%
2.	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP ibu hamil, pemberian makanan untuk bayi dan anak (PMBA) dll.	3.000	3.000	0	100%
3.	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (hygiene kit dan family kit)	50	5	45	10%



- d. Mutu Layanan Dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi

No.	Mutu Pelayanan Dasar	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/Jasa yang belum tersedia	Capaian Mutu (%)
1.	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	94050	94050	0	100%
2.	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	983.909	983.909	0	100%
3.	Wadah pengiriman spesimen (specimen carrier)	4	4	0	100%
4.	Tempat sampah biologis	4553	4553	0	100%
5.	Formulir : form penyelidikan epidemiologi form/lambar KIE alat tulis yang diperlukan	50.830	50.830	0	100%
6.	Alat pemeriksaan fisik (stetoskop, thermometer badan, tensimeter, senter, test diagnostic cepat dll)	1708	1708	0	100%
7.	Alat dan bahan pengambilan specimen (tabung, pot, media amies, dll) untuk specimen yang berasal dari manusia dan lingkungan sesuai dengan jenis penyakit	50	50	0	100%

#### 4. Alokasi Anggaran

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di bidang urusan kesehatan diselenggarakan dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 59.678.388.362,50

Berikut uraian alokasi APBD pada urusan kesehatan :

No	Indikator	Alokasi (Rp)	Sumber
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Rp.60.454.865,-	APBD
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa.	Rp. 59.617.933.497,50,-	APBD

## 5. Dukungan Personil

Dalam upaya untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan, kondisi sumber daya manusia yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat (Dinas Kesehatan, Unit Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat (UKKOM), Unit Laboratorium Kesehatan Daerah dan Unit Pelatihan Kesehatan didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 833 orang yang terdiri dari Personil PNS sebanyak 646 orang dan personil non PNS sebanyak 187 orang.

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- ❖ Permasalahan pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana :
  - 1) Komunikasi dalam pengumpulan data di kabupaten/kota belum optimal dikarenakan dalam pengumpulan data tidak turun langsung kelapangan namun hanya melalui media komunikasi (Telp,WA) mengingat kondisi saat ini masih pandemi Covid
  - 2) Masa pandemi covid-19 dan PPKM Mikro untuk penanganan bencana hanya dapat koordinasi melalui media telekomunikasi tidak turun langsung kelapangan
  - 3) Belum ada kolaborasi yang baik dalam pengelolaan data dan kegiatan penanganan bencana (masih bersifat varsial).
  - 4) Tidak ada posko kesehatan penanganan bencana terpadu di Dinas Kesehatan.
  - 5) Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana jarang sekali dilakukan.
  - 6) Data penanganan bencana masih sangat minim dan tidak publikasikan.
  - 7) Relawan yang masuk tidak teregistrasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan kesehatan pada bencana sehingga berakibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak terjadwal dengan baik.
  - 8) Logistik bencana masih banyak yang kurang karena tidak ada koordinasi yang baik antar bidang/ seksi.
- ❖ Permasalahan pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi :
 

Masih banyak penduduk yang tidak memeriksakan kesehatannya ke Fasyankes saat terjadinya Kejadian Luar Biasa, masih menganggap tidak terkena masalah,

atau tidak merasakan sakit, hal ini menjadi cakupan layanan pada masyarakat yang terkena dampak, tidak dilayani, atau sakit tidak dirasakan sehingga tidak ke fasilitas pelayanan Kesehatan.

b. Solusi

- ✓ Solusi pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana :
  - 1) Mengaktifkan dan mengoptimalkan komunikasi melalui media komunikasi (Telp,WA) baik grup maupun perorangan ke instansi terkait. Jika memungkinkan dapat turun langsung ke daerah yang mengalami bencana.
  - 2) Kolaborasi dalam pengolahan data dapat dilakukan bersama dan 1 manajemen sehingga data yang ditampilkan diolah dengan baik dan menggambarkan penanganan bencana sesungguhnya.
  - 3) Didirikannya posko Kesehatan dengan manajemen 1 pintu dan dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kab/ Kota.
  - 4) Evaluasi/ rapat dalam penanganan bencana Harus sering dilakukan dan dikomunikasikan untuk memperoleh gambaran serta Tindakan yang tepat di lapangan.
  - 5) Relawan yang masuk harus diorganisir teregistrasi dengan baik oleh Dinas Kesehatan sebagai pengelola kegiatan kesehatan pada bencana sehingga berakibat bantuan yang tidak tepat sasaran dan tidak terjadwal dengan baik
  - 6) Selalu mengupdate kebutuhan logistik dan melakukan koordinasi antar kluster kesehatan sehingga persediaan dan pendistribusian dapat terpenuhi dengan baik.
- ✓ Solusi pada layanan dasar pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi :

Akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang terkena dampak saat terjadinya Kejadian Luar Biasa, melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, juga kader atau perangkat desa, sehingga pesan yang akan disampaikan bisa diterima dan dipahami oleh masyarakat dan yang pada akhirnya masyarakat mau memeriksakan Kesehatan ke Fasyankes, atau bisa mendapatkan pelayanan Kesehatan, termasuk pengobatan dan profilaksis.